

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA
KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

Muhamad Samsul Alam¹, Muh.Nasir², L.M. Elwan³

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Kendari.

Universitas Halu Oleo, muhamadsamsul328@gmail.com

Universitas Halu Oleo, nasirmuh19@gmail.com , Kendari, Indonesia

Universitas Halu Oleo, muh.elwan@uho.ac.id , Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra Kabupaten Muna dalam pemilihan umum tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni sebanyak 7 orang, antara lain Komisioner KPU Kabupaten Muna (1 orang), Relawan demokrasi basis penyandang disabilitas (1 orang), penyandang disabilitas tuna netra (5 orang).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuna netra ikut berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2019, antara lain : mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, mengikuti proses pemberian suara, melakukan kampanye dan ikut memantau suara pada pemilihan umum tahun 2019

Kata Kunci : Disabilitas tuna netra, partisipasi politik, pemilihan umum

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the political participation of persons with disabilities in the Muna Regency of the blind in the 2019 general election.

This research uses descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely as many as 7 people, including the Commissioner of the Muna Regency KPU (1 person), democratic volunteers with disabilities (1 person), persons with visual impairments (5 people).

The results of this study indicate that persons with visual impairments participate in the 2019 general elections, including: participating in socialization organized by the KPU, following the voting process, conducting campaigns and participating in monitoring votes in the 2019 general election.

Keywords: visually impaired, political participation, general election

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi khususnya di Indonesia. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang telah berumur 17 tahun keatas dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (Pemilu).

Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Sejalan dengan pemahaman seperti di atas terdapat korelasi antara partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok dengan pemilihan umum yang bertujuan memilih pemimpin.

Oleh karena itu secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama tersebut merupakan media penyaluran kepentingan atau sekurang-kurangnya dapat diperhatikan. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik, pada tahun 2019 telah diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Umum di seluruh provinsi yang ada di Indonesia termaksud provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung ada 17 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilu untuk provinsi Sulawesi Tenggara termaksud Kabupaten Muna. Pemilihan Umum

tahun 2019 ini pertama kali di laksanakan di Indonesia di mana Pilpres dan Pileg di gelar secara bersamaan. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU para kandidat presiden maupun kandidat anggota legislatif mendaftarkan diri sebagai calon presiden ataupun calon anggota legislatif dan yang akan secara resmi mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan oleh KPU diberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk melakukan kegiatan kampanye. Saat calon presiden dan calon anggota legislatif melakukan kampanye, KPU selaku penyelenggara pemilu melakukan upaya penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar jumlah pemilih yang akan berpartisipasi diketahui dengan jelas.

Sebagaimana jumlah daftar pemilih tetap tahun 2019 penyandang disabilitas tuna netra di Kabupaten Muna sebanyak 122 pemilih yang tesebar di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel 1.1 Sesuai hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh KPU.

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Tuna Netra Tahun 2019 Di Kabupaten Muna

No	Nama Kecamatan	Tuna netra
1	Napabalano	5
2	Maligano	3
3	Wakorumba Selatan	5
4	Lasalepa	14
5	Batalaiworu	5
6	Katobu	5
7	Duruka	6
8	Lohia	4
9	Watopute	14
10	Kontunaga	8

11	Kabangka	0
12	Kabawo	11
13	Parigi	1
14	Bone	6
15	Tongkuno	18
16	PasirPutih	1
17	KontuKowuna	2
18	Marobo	1
19	Tongkuno Selatan	2
20	PasiKolaga	2
21	Batu Kara	4
22	Towea	5
Jumlah		122

Sumber : KPU Kabupaten Muna

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa total pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang terdaftar dalam DPT berjumlah 122 pemilih, dan satu kecamatan yang tidak memiliki penyandang disabilitas tuna netra yaitu Kecamatan Kabangka.

Dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muna penyandang disabilitas tuna netra, akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas tuna netra di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas tuna netra dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, penyandang disabilitas dengan tuna netra, harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf *braille* untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Hambatan dan kendala yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas tuna netra saat dilaksanakannya pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas tuna netra serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas tuna netra banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas tuna netra yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Oleh karena itu terkadang kelompok-kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas tuna netra mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional ataupun lokal.

Dengan demikian pentingnya mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra yang merupakan kelompok minoritas pada Pemilihan Umum baik saat pelaksanaan maupun saat berlangsungnya kegiatan kampanye merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak universal (*universal suffrage*) bagi setiap warga negara pada negara demokrasi seperti Indonesia.

Berdasarkan pada pemaparan masalah seperti tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian pada Penyandang disabilitas dalam hal ini Tuna Netra Di Kabupaten Muna pada pemilu 2019 dengan judul **“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas (Tuna Netra) Kabupaten Muna Dalam Pemilihan Umum 2019”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas (Tuna netra) Kabupaten Muna dalam Pemilihan Umum tahun 2019?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian yang di lakukan ini adalah

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik khususnya tentang kajian partisipasi politik masyarakat terutama para penyandang disabilitas yakni Tuna Netra dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum tahun 2019.

2. Manfaat Metodologi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Panti Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kabupaten Muna dalam memaksimalkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas tuna netra pada pemilu sebagai bagian dari hak dan amanat konstitusi sebagai warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis.

Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Alasan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra pada pemilihan umum tahun 2019 adalah dikarenakan fakta, hambatan atau kendala pada proses pemberian suara serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang partisipasi politik penyandang disabilitas pada moment pilkada Kabupaten Muna.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah bentuk dan intensitas partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra pada Pemilihan umum serentak tahun 2019.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik sampel purposive (purposive sampling). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan sampel purposive (purposive sampling) yang didasarkan pada kemampuan informan dalam menggambarkan secara jelas mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra pada pemilu 2019. Metode penelitian ini adalah cara melakukan suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitiannya yaitu data kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha untuk menyajikan data dan fakta-fakta yang sesungguhnya para penyandang disabilitas tuna netra aktif atau tidak dalam hal partisipasi politik dalam pemilu serentak tahun 2019.

Dalam penelitian ini dari dua sumber yaitu :

Data Primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara.

Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan menggumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,

Selain itu data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna seperti jumlah penyandang disabilitas tuna netra yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Teknik pengumpulan data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari literature dan buku-buku.

Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Penelitian lapangan di KabupatenMuna terkait partisipasi politik penyandang disabilitas tuna netra Kabupaten Munadan penyelenggara di Kabupaten Muna.

1. Wawancara (*interview*) mendalam adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan yang diteliti.
2. Observasi adalah pengambilan yang digunakan peneliti dengan melakukan pengamatan secara sistematis terhadap data yang berkaitan obyek penelitian data alat bantu pengumpulan data lain. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kejadian ditempat peneliti.
3. Dokumentasi adalah mengumpulkan, mempelajari dan mencatat data-data yang diperlukan dan berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik analisa data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh Hanija (1996:20)seperti yang tampak pada bagian dibawah ini:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi studi dengan melakukan obsevasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang cepat serta untuk menentukan focus maupun pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung dan ditentukan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak difokuskan wilayah penelitian.
3. Sajian data, yaitu rakitan organisasi reformasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data meliputi berbagai jenis matrik, gambar, jaringan kerja, keterikatan dan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilhan umum tahun 2019 kali ini di laksanakan secara serentak, masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya mulai dari penyaluran hak pilih dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April tahun 2019 pihak penyelenggara mengharapkan partisipasi pemilih mengalami peningkatan terutama golongan masyarakat penyandang disabilitas tuna netra.

Mengikuti Sosialisasi

Sosialisasi tentang pemilihan umum oleh KPU merupakan pendidikan politik terhadap masyarakat dan merupakan salah satu bentuk peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Muna Melalui relawan demokrasi di lakukan dalam berbagai bentuk sesuai sasaran pemilih salah satunya penyandang disabilitas tuna netra.

Proses Pemberian Suara

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak. Dalam hal ini, pileg dan pilpres di gelar sekaligus, dengan begitu pemilih akan mencoblos 5 surat suat yakni surat suar calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI, berdasarkan kondisi tersebut diata spemilih penyandang disabilitas tuna netra disediakan khusus template dengan huruf Braille agar mempermudah pemilih penyandang disabilitas tuna netra.

Kampanye

Kampanye merupakan sebuah upaya yang teroganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan selalu merujuk pada kampanye politik, padas etiap momentum pemillihan umum. Pada setiap momentum pemilihan umum kegiatan kampanye selalu diatur oleh pihak penyelenggara demi kondusifnya kegiatan kampanye masing-masing calon maupun masing-masing partai politik. Pada setiap kegiatan kampanye seluruh masyarakat berhak mengikuti kegiatan kampanye kecuali ASN yang tidak boleh mengikuti

kegiatan kampanye seba bitu di atur dalam undang-undang ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Untuk penyandang disabilitas tuna netra tidak terlibat langsung dalam kampanye akbar salah satu calon Presiden dan wakil Presiden tetapi mereka mengkampanyekan figur mereka kepada kerabat dekat mereka atau sesama mereka penyandang disabilitas tuna netra.

Pemantauan suara

Pada pemilihan kali ini untuk wilayah Kabupaten Muna ada kelompok tuna netra di Kabupaten Muna yang ikut terlibat dalam memantau jalannya pemilihan umum, kelompok tersebut terdiri dari individu-individu tuna netra yang beragama Islam yang berhimpun untuk tujuan mereka bersama, nama organisasi tersebut adalah Ikatan Tuna Netra Muslim Muna Indonesia (ITNMMI) yang beralamat di Kelurahan Wamponiki Kecamatan Batalaiworu. ITNMMI merupakan pengurus daerah Kabupaten Muna yang di resmikan langsung oleh pengurus pusat Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITNMI) pada tanggal 11 November 2018. ITNMMI merupakan organisasi tuna netra pertama di provinsi Sulawesi Tenggara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, para penyandang disabilitas tuna netra mengikuti sosialisasi yang di selenggarakan oleh KPU Kabupaten Muna Melalui relawan demokrasi basis penyandang disabilitas, mereka juga mengikuti proses pemberian suara pada TPS sekalipun mereka memiliki keterbatasan fisik namun mereka tetap antusias mengikuti proses pemberian suara, juga mengkampanyekan figur dukungan mereka terhadap kerabat dekat mereka, bahkan secara kelembagaan penyandang disabilitas kabupaten muna melakukan proses pemantauan suara pada pemilihan umum tahun 2019 melalui organisasi mereka yang di sebut Ikatan Tuna Netra Muslim Muna Indonesia atau disingkat ITNMMI.

DARTAR PUSTAKA

Althoff, Michael Rush dan Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

As'ari, Deni Kurniawan. 2006. *Kamus Istilah Politik & Kewarganegaraan*. Bandung: CV Yrama Widya.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Parwito. 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.